

PERAN PTAI DAN PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK

Adri Efferi

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

adri_efferi@yahoo.co.id

Abstract

Islamic Higher Education (PTAI) is an institution that became the foundation of Muslims, in order to provide or facilitate the Muslim community and other communities that want to learn Islam. Complaints about the quality of Islamic education is still low, one of which is caused by the low quality of educators. Therefore, as an institution educators should be more serious in performing their duties. Besides the support of stakeholders, both central and local levels, this makes the task of PTAI would be lighter, because education as a system would work well if it is supported by many stakeholders.

Keywords: *Quality, Teachers, Islamic Higher Education (PTAI)*

Abstrak

Pendidikan Tinggi Islam (PTAI) adalah lembaga yang menjadi dasar umat Islam, dalam rangka memberikan atau memfasilitasi komunitas Muslim dan masyarakat lainnya yang ingin belajar Islam. Keluhan tentang rendahnya kualitas pendidikan Islam salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidik. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidik harus lebih serius dalam melaksanakan

tugasnya. Selain itu, adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah, membuat tugas PTAI akan lebih ringan, karena pendidikan sebagai suatu sistem akan bekerja dengan baik jika didukung oleh banyak pihak.

Kata-kata kunci: *Kualitas, Pendidik, Perguruan Tinggi Agama Islam*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan dapat berlangsung mulai dari tingkat yang paling dasar (SD/MI), menengah (SMP/SMA/MTs/MA) sampai tingkat yang paling tinggi (PT/PTAI).

Salah satu elemen penting pendidikan adalah tenaga pendidik sebagai ujung tombak yang berada di garis depan (*frontline*). Sebagai pelaku, pendidik dalam institusi pendidikan secara langsung mengalami berbagai perubahan, yang berkaitan dengan pelaksanaan aktifitas pendidikan dengan segala dampaknya. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga pendidik menjadi keniscayaan. Selain itu, dalam sebuah institusi tenaga pendidik juga menjadi faktor yang sangat penting, untuk memacu pengelolaan lembaga yang dapat melayani peserta didik dengan baik.

Keluhan tentang kualitas pendidikan Islam yang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pendidik. Meskipun cukup sulit mendapatkan data tentang bagaimana kualitas tenaga pendidik di lingkungan kementerian agama, akan tetapi secara umum (*common sense*) bisa digambarkan bahwa realitas tenaga pendidik masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang dibakukan. Jika menggunakan ukuran pendidikan tinggi, maka standart 30 persen doktor juga masih belum bisa terpenuhi. Kira-kira masih butuh waktu

10 sampai 20 tahun untuk memenuhi kebutuhan doktor di perguruan tinggi.

Untuk peningkatan kualitas SDM pendidikan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melalui pendidikan lanjut. Makanya program studi lanjut bagi tenaga pendidik, haruslah tetap menjadi prioritas untuk pengembangan SDM di masa depan. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan varian-varian program studi yang diperlukan oleh masing-masing program studi.

Tantangan seperti ini tentu tidak mudah dijawab, sebab ada kaitannya dengan kemampuan pemerintah dalam rangka rekrutmen tenaga pendidik. Kemudian untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik juga dibutuhkan pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah pemihakan kebijakan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hanya dengan cara seperti ini maka tujuan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik akan dapat dicapai.

Berdasarkan pemikiran singkat di atas, tulisan ini akan mencoba mengulas bagaimana peranan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik, khususnya dalam lingkungan Kementerian Agama.

Kebijakan Kemenag Bagi PTAI

Terkait dengan Perguruan Tinggi (PT) khususnya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Kementerian Agama melalui Ditjen Pendis telah mengeluarkan Kebijakan, Program dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010-2014. Lebih lanjut dalam website kemenag.go.id dijelaskan Kementerian Agama RI di tahun 2010-2014 menetapkan 5 kebijakan yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk menjalankan 5 kebijakan tersebut, dalam rencana pelaksanaannya telah ditetapkan dalam 11 program Kementerian

Agama, salah satunya yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pendidikan Islam yaitu Program Pendidikan Islam, khususnya untuk menjalankan kebijakan pada no. 3 di atas.

Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam, lebih khusus pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dilakukan melalui sejumlah kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

Keluaran (*output*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: (a) meningkatnya akses pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), (b) meningkatnya mutu layanan pendidikan PTAI, (c) meningkatnya mutu dan daya saing lulusan PTAI, dan (d) meningkatnya mutu tata kelola PTAI.

Keluaran (*output*) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PTAI, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing bertaraf internasional; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan Ma`had Aly pada PTAI; penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; penguatan konsorsium ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat pengembangan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman di PTAI; serta peningkatan mutu tata kelola PTAI.

2. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu

Keluaran (*output*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan tersalurkannya beasiswa, bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi. Keluaran (*output*) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal.

3. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam

Keluaran (*output*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: (a) meningkatnya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dan

(b) meningkatnya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada PTAI. Keluaran (*output*) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan belajar; penyediaan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan lainnya.

Pembangunan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam pembangunan ini perlu dikembangkan paradigma pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memelihara lingkungan agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sehingga harus dihindarkan pembangunan yang merusak lingkungan. Melalui pendidikan kita menyiapkan sumber-sumber daya insani yang handal dan menjadi tulang punggung bangsa. Dengan dibekali semangat sebagai bangsa Indonesia, setiap orang akan tergerak untuk berkarya di bidangnya masing-masing. Seorang pengajar akan mengajarkan kepada peserta didiknya perhatian, sikap, dan keterampilan sehingga menjadi sumber daya insani yang lebih baik. Para teknokrat dan ekonom pun mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi sehingga manusia Indonesia bisa bergeser posisinya dari negara yang semula mengadopsi teknologi (*technology adaptif*) menjadi negara pengembang teknologi (*technology innovation*).

Berdasarkan kemampuannya dalam bidang teknologi, bisa dikelompokkan tiga jenis negara di dunia dikaitkan dengan penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi. *Pertama*, negara dengan kemampuan menciptakan dan mengembangkan sendiri teknologinya (*technologically innovator*), contohnya negara Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa, Jepang, dan sebagainya. *Kedua*, negara yang taraf kemampuannya baru sebatas mengadopsi teknologi (*technologically adaptor*), mempelajari dan memodifikasi serta mengembangkan sains dan teknologi yang sudah ada, karena belum bisa menemukan teknologi yang baru, contohnya Indonesia dan India. *Ketiga*, negara yang hanya memanfaatkan sains dan teknologi yang ditemukan oleh negara lain (*technologically excluded*), sebagian besar negara di dunia termasuk golongan negara ini, misalnya negara-negara berkembang yang kebanyakan berpenduduk muslim, negara-negara

Timur Tengah antara lain Arab Saudi, atau negara-negara miskin/terbelakang.

Kondisi ini tentunya sebuah ironi, mengingat pada abad ke-VII sampai XI merupakan zaman keemasan Islam dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologinya, karena sudah maju dan menguasai dunia. Namun sejak abad ke-XII, mengalami kemandekan (stagnasi) bahkan menurun tajam sekali. Penurunan dalam bidang sains dan teknologi ini sangat berkorelasi dengan penurunan tingkat ekonomi pada suatu bangsa, kecuali pada negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Arab Saudi. Negara Arab Saudi meskipun sumber daya manusia yang mengelola sains dan teknologi lemah, namun dari segi ekonomi tetap kaya, bahkan mampu membeli dan menghadirkan karya-karya yang spektakuler.

Sementara itu, bangsa Eropa pada masa dunia Islam mengalami masa keemasan itu masih belum maju, bahkan mereka banyak belajar kepada kaum muslim. Ketika dunia Islam mengalami stagnan dan kemunduran, bangsa Eropa sebaliknya mengalami peningkatan perkembangan sains dan teknologi, serta ekonominya yang begitu pesat. Apalagi saat itu terjadi abad pencerahan. Dalam kurun waktu 60 tahun belakangan ini perkembangan sains dan teknologinya dalam bidang informasi dan komunikasi berkembang beratus bahkan beribu kali lipat.

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia yang masih rendah. Kualitas SDM yang rendah, baik secara akademis dan non akademis, menyebabkan belum seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi menyumbangkan potensinya baik potensi fisik maupun non fisik dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan diperlukan. Sebab, keberhasilan pembangunan hanya dapat tercapai jika masyarakat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan. Hanya dengan kualitas SDM yang tinggi persoalan-persoalan bangsa Indonesia setahap demi setahap dapat terselesaikan dengan baik.

Membahas tentang sumber daya manusia, Achmad Sanusi (1998: 7) mengemukakan jika abad silam disebut abad kualitas

produk/jasa, maka masa yang akan datang merupakan abad kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dan pengembangan kualitas SDM bukan lagi merupakan isu atau tema-tema retorik, melainkan merupakan taruhan atau ujian bagi setiap individu, kelompok, golongan masyarakat, dan bahkan setiap bangsa.

Menilai kualitas SDM suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut. Oleh karena itu dalam proses peningkatan sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan harus merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Salah satu peran penting pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan perubahan zaman agar tidak terjadi kesenjangan antara realitas dan idealitas.

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dan kemajuan pendidikan adalah dua hal yang berjalan beriringan. Kalau kita perhatikan, kemajuan beberapa negara di dunia ini merupakan akibat perhatian mereka yang besar dalam mengelola sektor pendidikan.

Seorang tokoh pendidikan Jepang mengatakan bahwa pembaruan yang menyeluruh terjadi di Jepang karena adanya pengaruh investasi pendidikan. Seorang tokoh pendidikan lain dari Jerman setelah perang dunia II mengatakan bahwa pembaruan adalah berkat investasi sistem pendidikan. Tokoh dari Jepang dan Jerman tersebut selaku anggota komisi internasional pengembangan pendidikan akhirnya menyimpulkan mengenai peran pendidikan yaitu sebagai berikut: *for all those who want to make the world as it is to day a better place, and to prepare for the future, education is a capital, universal subject*. (Bagi semua orang yang menginginkan dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk saat ini dan persiapan untuk masa depan, pendidikan adalah modalnya dan merupakan kebutuhan yang bersifat menyeluruh atau universal) (Salam, 1997: 172-173)

Berangkat dari fenomena yang ada, bangsa-bangsa yang tergolong berkembang termasuk Indonesia mulai berbenah diri. Upaya awal yang mereka lakukan tentu saja dengan meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan oleh para pengambil kebijakan di negara ini adalah dengan menerapkan

standar nasional pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 3, terkait dengan standar-standar tersebut meliputi: standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan sehingga pendidikan itu harus mencapai standar isi, standar proses sampai standar penilaian pendidikan. Penetapan berbagai standar tersebut tentunya dengan maksud agar mampu meningkatkan daya saing pendidikan kita terhadap negara-negara di dunia.

Sebagai tambahan informasi, saat ini pendidikan di Indonesia belum mampu berbicara banyak dan Indonesia menempati urutan 111 dari 174 negara di dunia menurut *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP (Mulyasa, 2003: 3). Secara ekonomi daya saingnya juga masih rendah sekali, dibandingkan dengan negara-negara tetangga sekalipun seperti tercantum dalam peringkat *human resourch development index*.

Fungsi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2006: 4) pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Suatu lembaga yang relevan dan bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul dan

berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai pusat keilmuan (*centre of excellence*) hendaknya mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan mutu atau kualitas. Tingkat kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan perguruan tingginya. Namun, satu hal yang tidak bisa kita abaikan bahwa kemajuan dan kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh lulusan dari MA/SMA, MTs/SMP, dan MI/SD sebagai input atau bahan baku perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus secara komprehensif meliputi semua jenjang pendidikan.

Berbicara mengenai tantangan yang sedang atau akan dihadapi oleh sebuah perguruan tinggi, dalam hal ini Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) memiliki tantangan yang tidak ringan. Tantangan-tantangan itu meliputi: pengembangan sumber daya insani, sains, dan teknologi. Realitas menunjukkan sedikit sekali produk-produk atau ilmu-ilmu sains dan teknologi yang cukup signifikan telah dikuasai oleh orang-orang dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Belum lagi bila kita membahas tentang tantangan yang dihadapi perguruan tinggi ini, berkaitan dengan fungsi dan tugasnya sebagai sebuah perguruan tinggi sebagaimana yang telah disebut di awal pembahasan.

Dalam berbagai literatur, perguruan tinggi itu sebenarnya memiliki tiga fungsi yang harus diemban. *Pertama*, fungsi pengembangan sumber daya insani, *kedua*, fungsi pengetahuan dan teknologi, dan *ketiga*, fungsi perubahan di masyarakat (*agent of change*). Ketiga fungsi perguruan tinggi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengelola dan civitas akademika perguruan tinggi.

Fungsi pertama perguruan tinggi adalah membangun sumber daya insani (*human resources development*). Sejatinya, pelaksanaan pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi (pada strata satu, dua, ataupun tiga) semuanya ditujukan untuk membangun sumber daya insani yang diperlukan oleh suatu bangsa. Suatu bangsa akan bertahan (*survive*) kalau dia memiliki sumber daya insani yang berkualitas terutama memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*). Pengetahuan dan kemampuan ini dibangun melalui pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu, setiap pendidikan tinggi harus menjalankan fungsinya sebagai pengembang sumber daya insani.

Jika dikaitkan dengan bidang ekonomi, maka perguruan tinggi harus mampu mengembangkan aspek modal yang terkait dengan manusianya, sehingga roda perekonomian bisa tumbuh pada suatu bangsa itu. Sekalipun terjadi krisis ekonomi yang berskala global, bangsa akan mampu bertahan dari guncangan ekonomi tersebut. Sebaliknya, jika suatu bangsa tidak memiliki atau menyiapkan modal manusianya dengan sebaik mungkin, apalagi di zaman globalisasi ini, maka pertumbuhan ekonomi akan tersendat.

Fungsi kedua perguruan tinggi adalah mengembangkan sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini pada beberapa perguruan tinggi kadang-kadang dilupakan atau tidak diperhatikan. Sejauh ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada beberapa perguruan tinggi, hanya terfokus pada melaksanakan aktifitas pembelajaran kepada peserta didik, akan tetapi terkait dengan kegiatan melakukan berbagai upaya penelitian sebagai upaya pengembangan (*research development*) belum banyak dilakukan. Kalaupun sudah ada yang melakukannya belum bisa dikatakan optimal, bahkan cenderung hanya formalitas semata. Berbagai riset pengembangan yang akan dilakukan, tentunya tidak boleh keluar dari koridor pengembangan sains dan teknologi dalam berbagai bidang yang di perguruan tinggi bersangkutan.

Sesuai dengan maknanya sains adalah kumpulan teori dan proses yang dibangun berdasarkan fakta-fakta empirik, kemudian dirumuskan dalam sebuah statement-statement yang bisa berfungsi nantinya. Teori-teori ilmiah yang telah dibangun tersebut tidak hanya berfungsi penjabaran (deskriptif) tetapi juga ramalan (prediktif) dan pengawasan (*control*). Pemahaman tentang sains seperti tersebut di atas, barangkali akan menemukan titik temu bila dalam taraf aplikasinya didasarkan pula pada paradigma agama, sebab tidak ada pertentangan antara sains dan agama (khususnya agama Islam). Dasar berpikirnya adalah ketika sains itu akan diaplikasikan, maka kita akan berpikir tentang norma dan nilai yang akan dikembangkan. Misalnya teknologi tentang nuklir, sekalipun tidak ada pertentangan dengan agama. Namun ketika akan diaplikasikan, maka akan timbul pertanyaan untuk apa teknologi nuklir itu? Jika untuk berperang, membunuh, atau menghancurkan orang lain tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi jika untuk mensejahterakan, seperti sarana pembangkit listrik tentunya akan menjadi amal kebajikan.

Kembali pada pentingnya sebuah perguruan tinggi melakukan riset pengembangan, disamping untuk keperluan perguruan tinggi itu sendiri juga diharapkan akan bermunculan perguruan tinggi yang memiliki tingkat produksi tinggi dalam menghasilkan manusia unggul dan berkualitas sebagai peneliti dengan hasil penelitian yang relevan dan bermanfaat. Selain itu juga mendukung kemitraan antara perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian dan berbagai sektor kehidupan seperti sektor industri atau perdagangan sebagai unsur penting dalam pembangunan nasional.

Inilah yang seharusnya menjadi visi ke depan sebuah perguruan tinggi, untuk menyiapkan manusia yang handal, tidak hanya dalam proses pembelajaran yang dilakukannya, tetapi juga mempunyai perencanaan matang dalam proses pembelajaran dan riset. Intinya, riset-riset dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa digalakkan oleh sebuah perguruan tinggi, dalam upaya mencetak alumni yang berkualitas dan sekaligus meningkatkan daya saingnya, baik sesama perguruan tinggi dalam negeri, syukur-syukur bisa bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Fungsi ketiga perguruan tinggi adalah melakukan perubahan di masyarakat (*agent of change*), menuju ke arah yang lebih baik bukan sebaliknya malah lebih jelek. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola, mengendalikan, merekayasa, memperbaiki dan merekonstruksi masyarakat. Tata sosial, perilaku sosial, dan perubahan sosial diusahakan tetap berdasarkan pada falsafah hidup yang ada di masyarakat.

Bagi masyarakat, penilaian terhadap sebuah perguruan tinggi bukan hanya dilihat dari bangunan tembok yang nampak tinggi dan indah, tetapi sejauh mana perguruan tinggi itu mampu memberikan dampak-dampak positif pada perubahan yang ditimbulkan dari kegiatannya di masyarakat. Tidak cukup sampai disitu, perubahan-perubahan yang dinikmati oleh masyarakat ruang lingkungannya bukan hanya sebatas yang ada di sekitar kampus perguruan tinggi tersebut, seyogianya dapat meluas ke tingkat regional dan nasional, bahkan internasional, sehingga dari sekedar agen perubahan (*agent of change*) meningkat menjadi pemimpin dalam perubahan (*leader of change*). Inilah salah satu indikator kebermaknaan suatu perguruan tinggi yang dapat membuat masyarakat mampu bertahan (*survive*), dalam

menghadapi berbagai tantangan hidup yang setiap hari semakin berubah dan semakin berat saja.

Peran Perguruan Tinggi

Dari tiga fungsi perguruan tinggi sebagaimana panjang lebar sudah diurai di atas, kemudian muncullah apa yang kita namakan dengan peran perguruan tinggi. Peran-peran tersebut dikenal dengan istilah Tridharma (tiga pengabdian) perguruan tinggi yang ketiganya saling terpadu. Tridharma tersebut meliputi: *pertama*, pendidikan dan pengajaran (*teaching and learning*), *kedua*, penelitian dan *ketiga*, pengabdian.

Tridharma pertama perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran (*teaching and learning*). Peran ini menjadi fondasi dalam pelaksanaan sebuah perguruan tinggi, karena lebih banyak diarahkan untuk pengembangan sumber daya insani. Indikator berkualitasnya pendidikan dan pengajaran salah satu normanya adalah berkaitan dengan satuan kredit semester (SKS). SKS itu bobot yang diberikan kepada tiap mata kuliah yang menunjukkan berapa banyak pertemuan itu dilaksanakan, berapa banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik maupun dosen, berapa banyak pula upaya-upaya yang dilakukan oleh peserta didik dan dosen dalam meningkatkan diri melalui kegiatan tatap muka, belajar mandiri dan mengerjakan tugas. Misalnya, satu mata kuliah bobotnya 3 SKS dengan satuan waktu 50 menit. Artinya bagi peserta didik harus mengikuti kuliah 3 kali 50 menit kali 14 kali pertemuan (12 kali perkuliahan, 1 kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 kali Ujian Akhir Semester (UAS) dalam satu semester. Ditambah 3 kali 50 menit mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Ditambah lagi 3 kali 50 menit mengerjakan tugas atau belajar mandiri.

Jika peserta didik melaksanakan SKS itu dengan baik, maka akan dihasilkan peserta didik dengan hasil belajar yang berkualitas. Namun, keberhasilan itu akan dicapai jika dosen pun melakukan tugasnya dengan baik. Dosen harus datang ke kelas 3 kali 50 menit kali 14 kali pertemuan untuk berinteraksi dengan peserta didik. Dosen pun perlu persiapan-persiapan yang matang untuk memberikan pengajarannya. Kemudian dosen pun harus memeriksa semua tugas peserta didik dan mengembalikannya kepada peserta didik, sehingga

diketahui benar atau salahnya pekerjaan yang dilakukan peserta didik tersebut. Selain itu, dosen pun dituntut untuk selalu membaca sekurang-kurangnya 3 kali 50 menit. Dengan demikian bahan-bahan kuliah yang akan diajarkan kepada peserta didik akan selalu *up date*.

Dosen menjadi parameter penting dalam proses pengendalian kelembagaan perguruan tinggi karena kedudukannya yang sangat sentral, menempatkan dosen sebagai SDM utama pemegang kunci operasional tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi. Dengan kemampuan profesional dan hubungan yang dekat dengan mahasiswa dan sejawat, dosen sangat menentukan perkembangan institusi, mempengaruhi lingkungan intelektual dan sosial kehidupan kampus. Oleh sebab itu, segala upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dosen sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi secara komprehensif perlu dilakukan agar fungsi dan perannya dapat terlaksana secara maksimal guna tercapainya tujuan organisasi.

Kendati telah dilaksanakan, program pengembangan profesionalisme dosen di Indonesia belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia memang sudah masuk dalam daftar perguruan tinggi terbaik di dunia, meskipun masih di urutan ke sekian. Demikian halnya dengan swasta, terdapat sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) yang kualitasnya bisa diandalkan dan setara dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Data yang dimiliki Litbang Depdiknas menunjukkan, dari 120.000 dosen tetap PTS dan PTN di Indonesia, masih ada 50,65 persen atau sekitar 60.000 di antaranya belum berpendidikan S2 atau baru S1. (Suara Pembaruan, 2008). Menurut data lain, jumlah seluruh dosen di PTN sebanyak 240.000 orang, 50% di antaranya belum memiliki kualifikasi pendidikan setara S2. Di antara jumlah tersebut, baru 15% dosen yang bergelar doktor. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia, Singapura dan Filipina yang jumlah doktornya sudah mencapai angka 60% lebih, maka tampak bahwa dosen di perguruan tinggi Indonesia masih jauh ketinggalan. (Syam, 2009: 10)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan dosen perguruan tinggi minimal S2. Dalam UU itu disebutkan, para pendidik jenjang pendidikan dasar dan menengah persyaratannya adalah minimal bergelar S1. Sementara, untuk mendidik di jenjang pendidikan akademis S1, maka sekurang-

kurangnya bergelar strata dua (S2), sedangkan bagi program pascasarjana adalah doktor (S3) dan profesor.

Kenyataan ini ironis mengingat salah satu cita-cita besar perguruan tinggi di Indonesia adalah menjadi universitas bertaraf internasional (*world class university*). Dengan 50% dosen yang masih berkualifikasi S1, sulit dalam waktu dekat menggapai cita-cita tersebut. Apalagi di tengah kondisi demikian, tidak tampak upaya signifikan dari para dosen untuk meningkatkan profesionalisme mereka sebagai elemen pokok perguruan tinggi. Sebagian mereka bahkan kurang menyadari bahwa profesi dosen, sebagaimana profesi lainnya, juga terkait dengan dimensi pengetahuan, keahlian, dan etika yang perlu terus dikembangkan. Sayangnya, dimensi-dimensi tersebut tidak banyak diperhatikan oleh para dosen, sehingga tidak heran jika sorotan dan kritik terus dialamatkan kepada mereka.

Di antara kritik yang sering dilontarkan terkait kualitas dosen perguruan tinggi di Indonesia adalah: *Pertama*, sekarang ini minat sebagian dosen untuk terus membaca dan melakukan riset ilmiah di bidang keilmuannya sudah menurun. Mereka tampak sudah merasa puas dengan gelar doktor atau Ph.D yang diraihinya. Mereka sudah tidak lagi sibuk dengan penelitian ilmiah yang menjadi tugas pokok mereka untuk menyumbangkan hal-hal baru dalam bidang keilmuannya. Kalaupun mereka melakukan sebuah penelitian, biasanya itu tidak dimaksudkan untuk menemukan hal baru atau menyumbang sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tetapi untuk meraih kenaikan pangkat atau mencapai posisi guru besar belaka.

Hasil penelitian Bambang Sumardjoko (2009) dari FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang dipublikasikan pada jurnal *Cakrawala Pendidikan*, November 2010, Th. XXIX, No. 3 menyatakan bahwa, berdasarkan data di Lembaga Penelitian PTS di wilayah Surakarta, rata-rata judul penelitian yang diusulkan oleh dosen dalam satu tahun berkisar antara angka 10%-20% dari jumlah dosen di PTS yang bersangkutan.

Kedua, tidak sedikit para dosen yang beranggapan bahwa tugas utamanya hanya menyampaikan pengetahuan atau menugaskan penelitian ilmiah kepada para mahasiswa. Mereka sering alpa bahwa mereka adalah pendidik dalam pengertian seluas-luasnya. Di pundak mereka terpikul tanggung jawab yang melampaui tembok kampus, yaitu untuk mendidik mahasiswa, baik dari sisi keilmuan, mental, cara berpikir, perilaku, dan sebagainya. Namun terkadang sangat disayangkan terdapat beberapa perilaku oknum dosen yang jauh dari sosok panutan bagi para mahasiswanya. Seperti yang ditulis pada

TEMPO Interaktif Bandung, tertanggal 11 Februari 2010 perihal terungkapnya kasus plagiat yang menimpa salah seorang Guru Besar Jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung. Bahkan yang lebih parah lagi, seperti ditulis oleh *tabloidjubi.com* pada tanggal 03 Juli 2010 tentang fenomena seks bebas antara dosen dan mahasiswa di Papua. Meskipun kasus plagiat, seks bebas dilakukan oleh segelintir oknum, yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah dosen yang masih konsisten dengan tugasnya, namun tidak dapat dipungkiri perilaku para oknum itu telah mencoreng profesi dosen.

Ketiga, banyak dosen yang menghindarkan diri dari tugas utamanya sebagai pendidik dengan berbagai cara untuk menutupi kekurangannya. Misalnya dengan menerapkan "despotisme ilmiah" karena tidak mampu mengatasi dialog kritis dengan mahasiswa, lari dari topik utama perkuliahan untuk menghabiskan waktu karena tidak menguasai materi, atau memberi penugasan kemudian membiarkan para mahasiswa berdebat sendiri dengan alasan melatih mereka berdiskusi, dan sebagainya. Contoh sikap menghindar dari tugas dapat juga berwujud pada minimnya tatap muka yang dilakukan di kelas. Hasil penelitian Ambarwati yang di publikasikan pada jurnal *maksi* tahun 2009 menunjukkan bahwa kehadiran dosen dalam melakukan proses belajar mengajar pada salah satu perguruan tinggi di kota Ambon menunjukkan bahwa jumlah tatap muka yang seharusnya minimal 18 kali per semester hanya diisi rata-rata 11 kali pertemuan.

Menurut hasil penelitian Bambang Sumardjoko seperti yang sudah dikutip di atas, dilihat dari data kehadiran dosen di kelas dapat dikatakan mutunya tidak terlalu buruk karena rata-rata kehadiran dosen di kelas diperoleh angka sebesar 70% dari standar yang ditetapkan. Bahkan, untuk PTS yang sudah memiliki lembaga penjaminan mutu angka kehadiran dosen di kelas tersebut bisa mencapai 90%.

Beberapa kondisi di atas sangat mungkin terjadi karena di kalangan para dosen masih terdapat berbagai kelemahan. Menurut Buchari (2008: 10), permasalahan yang ditemui di kalangan dosen adalah:

1. Kurang referensi bahan perkuliahan.
2. Kemampuan berbahasa asing sangat rendah.
3. Penempatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
4. Dosen yang ditempatkan berasal dari berbagai kelas sosial, daerah, etnis, usia, perilaku yang berbau menjai satu civitas akademika

sehingga bisa saja terjadi akses yang tidak diinginkan bila masing-masing tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada jurang yang lebar antara cita-cita ideal dengan kondisi riil para dosen perguruan tinggi di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti manajemen pendidikan, ekonomi, realitas sosial, dan lain-lain. Karena itu, untuk membenahinya juga diperlukan sebuah program pengembangan profesionalisme dosen yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, hingga masyarakat.

Dosen merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 3, bahwa untuk mencapai mutu standar pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh unsur tenaga kependidikan yakni dosen, tetapi juga bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa, "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dosen di perguruan tinggi mempunyai peran strategis ditinjau dari sisi pembinaan akademik dan mahasiswa. Dosen merupakan tenaga profesional yang menetapkan apa yang terbaik untuk mahasiswanya berdasarkan pertimbangan profesional. Banyak pengakuan yang menyatakan bahwa pengembangan mutu pendidikan dapat ditempuh melalui pengembangan mutu dosen. Hal ini tampak dari temuan penelitian sebelumnya bahwa dalam pendidikan berlaku "*the man behind the system*" (Miller, 1980: 76), manusia merupakan faktor kunci yang menentukan kekuatan pendidikan. Bahkan,

pendidikan sebagai industri jasa merupakan “*front line provider and determine the quality of service delivery system*”, dosen berada pada garis terdepan dalam menentukan kualitas pelayanan (Sallis, 2002: 35).

Perguruan tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal, keberhasilannya terletak pada upaya perkembangan dan pembinaan. Penggerak utama pertumbuhan, yaitu para dosen perguruan tinggi. Secara teoretis, banyak faktor yang dapat mempengaruhi peran dosen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah *effort* (usaha), *ability* (kemampuan), dan situasi lingkungan.

Tridharma kedua perguruan tinggi yaitu penelitian, yang muatannya lebih banyak berkaitan dengan pengembangan sains dan teknologi. Penelitian dianggap sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan dan penelitian yang dilakukan dosen dan peserta didik diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kerja sama, cara berpikir dan berkarya secara aktif dan kreatif, dan tidak ketinggalan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, agar memiliki kontribusi dalam perubahan yang terjadi di masyarakat menuju arah yang lebih baik serta dilandasi nilai-nilai yang luhur.

Tridharma ketiga perguruan tinggi adalah pengabdian, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika seperti dosen dan peserta didik dalam pengembangan masyarakat agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, baik untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang berdasarkan dari ilmu yang diperoleh dari pendidikan dan pengajaran serta hasil-hasil penelitian.

Sekalipun produk dari sebuah perguruan tinggi berorientasi pada masyarakat, namun sebuah prinsip yang harus dianut adalah jangan hanya memberi ikan, tapi siapkan juga kailnya. Untuk itu, aktifitas-aktifitas yang bersifat pengembangan masyarakat (*community development*) atau rekayasa sosial perlu ditingkatkan intensitasnya. Tujuan kegiatan ini adalah memberdayakan masyarakat agar mampu berdiri sendiri yang difasilitasi oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus benar-benar menunjukkan perannya secara aktif dengan melakukan kegiatan membina masyarakat supaya baik.

Upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi, tentunya sekali-kali jangan sampai ke luar dari disiplin ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh perguruan tinggi yang berkecimpung di bidang agama, sudah barang pasti konsentrasi pembinaan masyarakat yang dilakukan berkaitan dengan agama pula. Sekalipun tidak menutup kemungkinan dengan membuat jalinan kerja antar lembaga, kemudian juga melakukan pembinaan dalam hal kewirausahaan (*enterpreneurship*), tapi sifatnya hanya sebagai tambahan, fokus utamanya tetap bidang keagamaan.

Ketiga fungsi dan peran perguruan tinggi yang sudah dijelaskan di atas, memiliki kesalingkaitan antar satu dengan yang lain. Satu fungsi atau peran saja pincang, apalagi sampai ketiga-tiganya, maka akan sulit bagi perguruan tinggi tersebut untuk berkualitas, belum lagi bila targetnya mampu bersaing tentunya akan semakin berat. Satu hal lagi, eksistensi fungsi dan peran perguruan tinggi ini dikaitkan dengan keberadaan sistem pendidikan yang lebih besar lagi. Artinya, semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan perguruan tinggi mulai pimpinan, dosen sampai staf administrasi, dalam pikirannya harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Fungsi dan peran perguruan tinggi sebagai suatu lembaga pendidikan, juga harus dapat memberikan jaminan pemberian layanan yang bermutu kepada peserta didiknya. Layanan bermutu adalah layanan yang memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kepuasan itu tidak hanya dirasakan oleh peserta didik saja, melainkan juga orang tua atau masyarakat yang merasakan peserta didik sebagai sumber daya yang berkualitas.

Perguruan tinggi atau dosen dalam memberikan layanan, agar tetap bermutu memerlukan audit terhadap kinerja yang dilakukan, termasuk penilaian yang dilakukan oleh peserta didik terhadap kualitas dosen dalam menyampaikan pengajaran. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan dalam memberikan bahan kuliah untuk dijadikan bahan memperbaiki dan mengembangkan kemampuan yang lebih baik dengan bahan kuliah yang selalu baru (*up to date*). Penilaian dari peserta didik ini biasanya objektif karena mereka mengalami langsung pembelajaran dari dosennya, apakah memuaskan atau tidak memuaskan.

Dilihat dari konteksnya, fungsi dan peran perguruan tinggi berlaku dalam tataran yang bersifat umum atau universal. Siapa saja baik perorangan, masyarakat, maupun negara dalam menyelenggarakan perguruan tinggi harus menyadari fungsi perguruan tinggi itu.

Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam PTAI/UIN

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) adalah lembaga yang menjadi tumpuan umat Islam dalam rangka menyediakan atau memfasilitasi masyarakat muslim dan masyarakat lain yang ingin belajar Islam. Harapannya tentu dengan adanya lembaga pendidikan ini, mereka akan lebih mudah menggali, mempelajari dan menimba ilmu-ilmu keislaman.

Indikator-indikator kemajuan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi di lembaga Islam, meliputi berbagai standar, baik nasional maupun global. Jika memakai rujukan standar nasional, maka ada delapan standar. *Pertama*, standar isi, yang menunjukkan apakah isi pendidikan di lembaga pendidikan itu memenuhi harapan-harapan masyarakat atau tidak, ataukah hanya sekedar formalitas saja. *Kedua*, standar proses, sudahkan proses pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan itu memenuhi dan mencapai tujuan proses pembelajaran. Jika belum terpenuhi maka proses pembelajaran itu perlu ditingkatkan. *Ketiga*, standar kompetensi lulusannya. *Keempat*, pendidik. *Kelima*, standar sarana dan prasarana. *Keenam*, standar pengelolaan. *Ketujuh*, standar pembiayaan dan *Kedelapan*, standar penilaian pendidikan. Standar-standar itulah yang dijadikan ukuran untuk menilai kemajuan suatu lembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu pandangan lembaga pendidikan harus diorientasikan ke depan, agar mencapai apa yang diinginkan dan dibutuhkan.

Dewasa ini adalah eranya mutu atau kualitas, sebuah perguruan tinggi seandainya mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, sudah barang pasti akan diperhitungkan oleh masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sebaliknya jika tidak berkualitas maka akan diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam suatu proses pendidikan di sebuah perguruan tinggi, harus selalu memiliki komitmen untuk memberikan

jaminan bahwa proses pendidikan yang akan atau sedang dilaksanakan di perguruan tinggi itu berkualitas. Slogan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas ini tentu saja tidak hanya berupa ucapan semata (*lips service*), melainkan benar-benar dapat direalisasikan. Intinya, untuk mewujudkan kualitas pendidikan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kualitas sebuah lembaga pendidikan, termasuk kualitas perguruan tinggi.

Perguruan tinggi adalah salah satu media bagi pemerintah untuk memberikan layanan kepada anak bangsa. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika tata kelola atau manajemennya sebagian besar diatur oleh pemerintah pusat termasuk pembiayaan. Meskipun beberapa waktu belakangan ini, ada kecenderungan pemerintah ingin menyerahkan pengelolaan perguruan tinggi pada masing-masing lembaga (otonomi kampus), namun dengan maraknya beberapa kasus yang cenderung bersifat merugikan (SPP mahal, proses seleksi penerimaan yang tidak jelas dan lain-lain), saat ini pemerintah mulai mengambil alih kembali kewenangan pengelolaan tersebut.

Sekedar tambahan informasi, Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang pernah diterapkan oleh pemerintah bagi beberapa perguruan tinggi, bertujuan memberikan keleluasaan dalam tata kelola, manajemen kelembagaan, dan manajemen sumber daya manusia. Setiap perguruan tinggi harus punya peta kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Semua tertuang dalam SPM (*Minimum Service Standar*). Pertumbuhan peserta didik tiap tahun perlu dibuat program studi. Data peserta didik dan jumlah lulusan perlu dibuat sehingga rasio dosen dan peserta didik seimbang. Namun sayang, rencana yang baik belum tentu dalam tataran aplikasinya di lapangan, akan menuai hasil yang baik pula. Itu juga yang terjadi dengan beberapa perguruan tinggi yang pernah mencoba menerapkan sistem pengelolaan model BHP dan BHMN tersebut.

Profil Lulusan PTAI

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) perlu memperoleh pengakuan yang bersifat luas. Bukan hanya di lingkungan atau kalangan lembaga-lembaga Kementerian Agama saja, tetapi juga diakui oleh lembaga-lembaga lain baik negeri

maupun swasta. Bahkan kalau perlu sampai tingkat internasional, sesuai dengan era sekarang yang bersifat global dan penuh kompetisi.

Untuk sampai ke sana, PTAI harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif yang bisa dipertandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lain. Artinya kita menginginkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan yang diakui secara luas dan kompetitif. Cita-cita ini perlu disikapi sebagai sebuah tantangan yang berat, sehingga membutuhkan kerja keras dan menuntut kita untuk benar-benar serius dalam menggapainya.

Oleh karena itu, delapan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perlu dielaborasi sedemikian rupa sehingga cita-cita besar untuk menjadikan PTAI sejajar dengan PT umum, bukan sekedar isapan jempol semata. Kita ambil contoh dalam standar kelulusan, barangkali bisa ditambahkan bagi para alumni sekurang-kurangnya harus memiliki kemampuan yang berkaitan dengan ICT (*Information and Communication Technology*). Kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang digunakan secara global. Misalkan saja, kemampuan berbahasa Inggris untuk komunikasi dunia global dan kemampuan berbahasa Arab untuk komunikasi dunia Islam. Kalau lulusan perguruan tinggi agama Islam ini memiliki standar kemampuan seperti itu, dia akan diterima secara luas karena memiliki nilai-nilai keunggulan kompetitif.

Dari segi bentuk kelembagaan, barangkali dalam rangka menjawab tantangan global, beberapa IAIN (Institut Agama Islam Negeri) telah bermetamorfosis menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Kalau boleh menilai, menurut hemat penulis UIN adalah IAIN yang dikomprehensifkan atau model universitas komprehensif. Kita ketahui bahwa tujuan didirikannya IAIN, menurut para pendiri dahulu adalah penguasaan keagamaan (*tafaqquh fiddien*), dengan bahasa lain supaya ada lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas mendidik orang yang paham tentang ilmu-ilmu agama khususnya Islam. Artinya lembaga pendidikan ini harus diarahkan untuk tercapainya tujuan itu.

Sekarang dengan transformasi IAIN menjadi UIN, seharusnya misi yang diemban tidak jauh melenceng dari wujud (*platform*) aslinya. Boleh saja mengembangkan program-program studi selain program studi keagamaan, tapi masih dalam kaitannya untuk

penguasaan keagamaan (*tafaqquh fiddien*) tadi, dengan kata lain tidak boleh meninggalkan platformnya.

Oleh karena itu, seharusnya ada standar di mana setiap lulusan UIN dalam program studi apapun lulusannya disamping menguasai keilmuan yang menjadi konsentrasi fakultas yang dijalani, juga harus menguasai ilmu keagamaan. Misalkan saja, bisa membaca al-Qur'an dan tahu artinya. Bisa membaca kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Memenuhi kemampuan yang berkaitan dengan praktek-praktek ibadah yang dibutuhkan masyarakat. Kalau lulusan-lulusan UIN ke depan bisa memenuhi standar-standar seperti ini, maka platform IAIN yang asli tidak ditinggalkan tetapi UIN bisa mengembangkan program-program studi yang terkait dengan sains dan teknologi.

Pertanyaannya apa bedanya antara lulusan-lulusan program studi yang sejenis antara lulusan UIN dan lembaga pendidikan lainnya. Kalau standar tadi dicapai maka perbedaannya adalah kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan aspek keagamaan (*tafaqquh fiddien*) itu. Artinya akan dihasilkan oleh UIN kalau program studi kedokteran akan menghasilkan dokter, tetapi dokter lulusan UIN ini memiliki kemampuan-kemampuan bidang kedokteran tidak terlalu berbeda dengan lulusan-lulusan kedokteran di lembaga pendidikan lainnya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan keagamaan (*tafaqquh fiddien*), kemampuan komunikasi baik dengan lisan atau tulisan maupun dengan bantuan dari teknologi ICT dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.

Pada akhirnya nanti, lulusan fakultas sains dan teknologi UIN bisa berkompetisi di masyarakat. Kalau ini dimiliki, maka nilai kompetisinya kuat sekali karena masih banyak para pemakai lulusan (seperti perusahaan-perusahaan) yang menginginkan karyawannya, disamping menguasai keterampilan *hard skill* juga memiliki kelihaihan *soft skill*, tidak dipungkiri lagi inilah kualitas yang tertinggi. Apalagi kalau kita bicara untuk mengirim atau mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Lulusan UIN bukan hanya bisa mencari peluang di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris tetapi juga di negara-negara bahasa Arab.

Membangun Strategi Pengembangan

Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif yang mengintegrasikan segala *resources* dan *capabilities* yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen strategik adalah suatu proses yang *continuous*, *iterative* dan *crossfunctional* yang bertujuan untuk menjamin agar lembaga pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang ada. Agar Perguruan Tinggi dapat bergerak dengan cepat dan benar, maka diperlukan kemampuan menentukan posisi baru dengan paradigma dan orientasi baru yang disebut dengan *repositioning*. Reposisi Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan menilai dan mereview seluruh kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menentukan mana yang harus diperbaiki dan diperkuat.

Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan, diantaranya:

1. Menciptakan *trust* dan *confidence* untuk *stakeholder* Perguruan Tinggi.

Strategi pengembangan ini amatlah penting bagi Perguruan Tinggi, karena merupakan salah satu bentuk dari *public and social accountability* universitas. Diantara langkah pengembangan untuk menciptakan kepercayaan dan keyakinan pengguna pada Perguruan Tinggi bisa berwujud: membangun sarana fisik, memiliki sejumlah dosen tetap yang cukup, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, tersedia sejumlah Laboratorium yang diperlukan, perpustakaan modern, fasilitas olahraga, seni maupun pusat pembinaan keagamaan berupa masjid yang tidak saja difungsikan sebagai tempat ibadah melainkan juga sebagai tempat kajian dan pendalaman wawasan keislaman dan kemasyarakatan.

2. Membangun *competitive advance centres*.

Dengan membangun pusat-pusat keunggulan di bidang akademik dan *eunterpreuner* akan membangun *brand image* di masyarakat. Beberapa contoh pusat unggulan yang dapat dikembangkan oleh Perguruan Tinggi seperti yang telah dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) diantaranya: Pusat Pengembangan Bioteknologi, Unit Produksi Internet, Bengkel Motor terintegrasi, Kursus Bahasa Asing (KBA), ATC (Auto Cad Training Centre), Cisco *Academy* dapat digunakan oleh

sivitas akademika untuk mengembangkan diri secara nyata dalam berkehidupan di masyarakat.

3. Mengembangkan ICT (*Information and Communication Technology*)

Dengan membangun dan mengembangkan ICT yang dipergunakan dalam proses-proses belajar mengajar, manajemen dan interaksi antar unit di Perguruan Tinggi. Pengembangan komunitas ICT di dalam kampus diimbangi dengan pembangunan prasarana IT yang memadai seperti koneksi dengan menggunakan serat optik, layanan *Hot spot* secara gratis bagi mahasiswa, dan lain lain.

4. Membangun profesionalisme, menjamin kualitas dan menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*.

Perguruan Tinggi sebagai organisasi pendidikan memiliki kepentingan terhadap pelestarian budaya, nilai, pemandirian dan juga bisnis. Oleh karena itu Perguruan Tinggi dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman (*fashionable*). Pendidikan menyangkut dimensi sistem, paradigma dan kultur. Budaya Perguruan Tinggi perlu disesuaikan dengan pergeseran paradigma dunia, yang berorientasi pada *customer*, kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), keterbukaan manajemen, dan jaminan kualitas. Jaminan kualitas pendidikan (*quality assurance*) merupakan titik temu antara harapan para pemakai layanan (*client*) dan pemberi layanan pendidikan (*provider*).

Kualitas pendidikan merupakan hal yang selalu di diskusikan para ahli pendidikan. Untuk masyarakat yang berbeda, mungkin definisi kualitas pendidikan akan berbeda, demikian pula dengan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. *Quality Assurance* sebagai alat ukur kualitas telah diimplementasikan dalam pendidikan di beberapa negara yang telah maju sebagai sebagai bentuk akuntabilitas untuk standar profesional di bidang pendidikan. *Quality Assurance* yang terencana dengan baik dan tersistematis akan dapat digunakan untuk merefleksi diri, memonitor kinerja pendidikan, memberikan gambaran komprehensif keefektifan proses pendidikan dan kinerja universitas, *sustainable improvement* universitas, serta dapat digunakan untuk memberikan jaminan atau kepercayaan suatu produk atau jasa pendidikan dikatakan berkualitas.

5. Membangun kerjasama dengan institusi lain.

Membangun jalinan kerjasama dengan institusi lain merupakan hal yang tidak dapat di hindari. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi ini, maka dunia akan terasa menjadi lebih kecil karena jarak sudah tidak lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Dengan komunikasi keterbatasan geofrafis seakan menghilang dan menjadi satu kesatuan masyarakat global.

Penutup

Ada dilema yang dihadapi oleh lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada dasarnya, lembaga pendidikan ini berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, namun oleh regulasi Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dikualifikasi sebagai lembaga pendidikan umum setara dengan lembaga pendidikan yang berada dalam pembinaan langsung Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan demikian, Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional dan secara fungsional berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional.

Posisi yang mendua ini, pada satu sisi dapat dikatakan membantu Kementerian Agama. Karena beban tanggung jawab pembinaannya dibagi dua dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Namun pada sisi yang lain, menjadikan alur administrasi menjadi dua pintu dan ada kesan berbelit-belit. Sebagai contoh dalam proses kenaikan pangkat bagi dosen, pertama berkas diperiksa dan dinilai oleh lembaga si pengaju, kemudian dilanjutkan ke Kemenag pusat, setelah diteliti dilanjutkan lagi ke Kemendiknas pusat. Bandingkan dengan dosen-dosen yang berada di bawah naungan Kemendiknas, setelah dinyatakan lolos dalam penilaian lembaga, langsung dibawa ke Kemendiknas pusat. Maka tidak mengherankan apabila jenjang karir dosen-dosen di lingkungan Kemendiknas, lebih cemerlang karena prosedur kenaikannya yang satu pintu atau satu Kementerian saja.

Terlepas dari kondisi yang kurang menguntungkan ini, sebagai tenaga pendidik di lingkungan Kemenag tidak boleh putus asa. Menghadapi berbagai tantangan masa depan, baik yang berdimensi makro global, berskala mikro nasional, maupun yang berhubungan

dengan aspek teknis lokal, maka diperlukan pengembangan pendidikan yang meliputi segala jenis dan jenjang, agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari perspektif tersebut, maka pembangunan pendidikan merupakan agenda nasional yang sangat strategis, mengingat beberapa argumen : (1) pendidikan dimaknai sebagai upaya melakukan investasi sumberdaya manusia yang mempunyai implikasi luas, (2) pendidikan akan melahirkan elit sosial yang menjadi motor kemajuan dan pelopor pembangunan, (3) pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (4) pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan martabat bangsa.

Akhirnya, sudah pasti tulisan singkat ini belum bisa menjawab berbagai persoalan dengan sempurna, namun sebagai sebuah wacana barangkali tulisan singkat ini perlu mendapat apresiasi, untuk lebih baiknya di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Alma, B. dan Hurriyati, R. (ed.). (2008). *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan: Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima*. Bandung: Alfabeta.
- Ditjen Pendis Kemenag RI, Kebijakan, Program dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010-2014, www.pendis.kemenag.go.id, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2013.
- Miller, R.I. 1980. "Appraising Institutional Performance". *Improving Academic Management*. USA: John Wiley and Sons.
- Mulyasa, E, (2003), *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Syam, (2004), *Institusi Sosial di Tengah Perubahan*, Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- Nur Syam, Peningkatan SDM PTAI, www.nusyam.sunan-ample.ac.id, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2013.
- R. Eko Indrajit dan R. Djokopranoto, (2006), *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Salam, B. (1997), *Pengantar Pedagogik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sallis, E. 2002. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited.
- Sanusi, A. (1998). *Pendidikan Alternatif*. Bandung: Program Pascasarjana dan PT Grafindo Media Pratama.
- Sumardjoko (2009). *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta November 2010, Th. XXIX, No. 3